

Edukasi Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah bagi Mahasiswa

Andi Aditya Hardinto^{1*}, Erika Takidah², Gatot Nazir Ahmad³, Muhammad Yusuf⁴,
I Gusti Ketut Agung Ulupui⁵, Donant Alananto Iskandar⁶ 

^{1,6}Universitas Kalbis dan Komisi Informasi DKI Jakarta, Jakarta, Indonesia

^{2,3,4,5}Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

*Email Korespondensi: andi.hardinto@kalbis.ac.id

ABSTRACT

This community engagement program aimed to strengthen students' understanding of transparency and accountability in local government financial reporting. Participants were Accounting Education students at Universitas Negeri Jakarta during the second semester of 2025/2026. A needs assessment indicated that transparency was mainly understood as document publication, while using financial information for civic oversight was not understood. The program was conducted from 13 May to 3 June 2026 through presentations, numerical examples, case discussions, and an information commission hearing role-play. Evaluation used five observable indicators, assessed through discussion responses, group analyses, role-play decisions, and activity documentation. Results showed that four indicators were achieved: distinguishing information availability from usability, explaining the elimination of internal transactions, differentiating budget-based and accrual-based reports, and formulating arguments for information access. One indicator, tracing figures through financial statement notes, was partially achieved. Overall, the program improved students' capacity to interpret financial information and formulate questions for public oversight.

Keywords

Transparency, Accountability, Local Government Finance, Financial Literacy, Civic Oversight.



BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol 8, No.3, 2026, pp. 401 - 410
eISSN 2721-6381

Article History

Received : 7/17/2026 / Accepted : 8/14/2026/ First Published : 8/26/2026

To cite this article

Hardinto, A. A., Takidah, E., Ahmad, G. N., Yusuf, M., Ulupui, I. G. K. A., & Iskandar, D. A. (2026). Edukasi Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah bagi Mahasiswa. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 401 - 410. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v8i3.1892>



© The Author(s)2026

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peserta merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta pada semester genap 2025/2026. Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa transparansi masih dipahami terutama sebagai publikasi dokumen, sementara pemanfaatan informasi keuangan untuk pengawasan publik belum dipahami secara memadai. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Mei–3 Juni 2026 melalui presentasi visual, contoh numerik sederhana, diskusi kasus, dan simulasi sidang komisi informasi. Evaluasi menggunakan lima indikator perilaku yang dinilai melalui respons diskusi, analisis kelompok, keputusan dalam simulasi, dan dokumentasi kegiatan. Hasil menunjukkan bahwa empat indikator tercapai, yaitu membedakan ketersediaan dan keterpakaian informasi, menjelaskan eliminasi transaksi internal, membedakan laporan berbasis anggaran dan akrual, serta menyusun argumentasi terkait akses informasi. Satu indikator, yaitu menelusuri angka melalui catatan atas laporan keuangan, tercapai sebagian. Secara keseluruhan, kegiatan meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami informasi keuangan dan merumuskan pertanyaan untuk pengawasan publik.

Profil Penulis

Andi Aditya Hardinto, Donant Alananto Iskandar
Universitas Kalbis dan Komisi
Informasi DKI Jakarta, Jakarta,
Indonesia

Erika Takidah, Gatot Nazir Ahmad, Muhammad Yusuf, I Gusti Ketut Agung Ulupui
Universitas Negeri Jakarta,
Jakarta, Indonesia

Corresponding Author:
andi.hardinto@kalbis.ac.id

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Daerah, Literasi Keuangan, Pengawasan Publik.

Reviewing Editor
Maya Mustika

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, menilai, dan mengawasi penggunaan sumber daya publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menempatkan informasi yang dikelola badan publik sebagai informasi yang pada prinsipnya terbuka, sedangkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menekankan pentingnya layanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Namun, ketersediaan dokumen secara formal belum menjamin bahwa informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan secara efektif. Informasi yang bersifat teknis, agregat, atau sulit ditelusuri dapat tersedia secara publik, tetapi belum tentu mampu mendukung penilaian yang bertanggung jawab. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan

keterlihatan informasi, tetapi juga dengan kemampuan pengguna memahami dan menarik kesimpulan yang tepat dari informasi tersebut (Heald, 2006; Cucciniello *et al.*, 2017).

Mitra kegiatan adalah Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, dengan sasaran langsung mahasiswa dalam satu kelas pada Semester Genap 124 Tahun Akademik 2025/2026. Mahasiswa dipilih karena sedang membangun kompetensi akuntansi dan diproyeksikan menjadi pendidik, profesional, aparatur, peneliti, serta warga yang berhadapan dengan informasi keuangan publik. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki kemampuan tidak hanya membaca angka, tetapi juga menilai kelengkapan, keterbacaan, keterlacakan, dan relevansi informasi keuangan pemerintah bagi kepentingan publik.

Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui pengamatan fasilitator terhadap respons awal peserta, pertanyaan apersepsi, dan kesulitan yang muncul ketika istilah pelaporan keuangan pemerintah diperkenalkan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memahami transparansi sebagai kegiatan mengumumkan atau mengunggah laporan. Peserta belum secara konsisten membedakan antara informasi yang sekadar tersedia dengan informasi yang mudah ditemukan, dipahami, dibandingkan, dan digunakan. Permasalahan juga terlihat pada pemahaman mengenai transaksi internal antarsatuan kerja, perbedaan informasi berbasis anggaran dan berbasis akrual, serta keterkaitan laporan keuangan dengan hak memperoleh informasi dan dokumen pendukung.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan memahami informasi keuangan secara teknis dan kemampuan memanfaatkannya untuk kepentingan pengawasan publik. Kesenjangan ini perlu ditangani karena penyajian informasi yang lebih jelas dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan dan mendorong partisipasi yang lebih bermakna (Langella *et al.*, 2023). Transparansi juga perlu ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas dan partisipasi, karena keterbukaan informasi memiliki nilai publik ketika informasi tersebut dapat digunakan untuk meminta penjelasan, menilai keputusan, dan merumuskan masukan (Bovens, 2007; Harrison & Sayogo, 2014).

Sasaran Kegiatan

Sasaran langsung kegiatan adalah mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta yang mengikuti kegiatan pada Semester Genap 124 Tahun Akademik 2025/2026. Sasaran ini dipilih karena mahasiswa memiliki latar belakang pembelajaran akuntansi dan berada pada tahap pengembangan kompetensi yang dapat mendukung perannya sebagai calon pendidik, profesional, aparatur, peneliti, maupun warga yang menggunakan informasi publik.

Secara khusus, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah secara lebih substantif. Sasaran kemampuan yang dikembangkan meliputi: (1) membedakan antara ketersediaan informasi dan keterpakaian informasi publik; (2) memahami logika eliminasi transaksi internal dalam laporan keuangan pemerintah; (3) membedakan karakteristik informasi berbasis anggaran dan berbasis akrual; (4) mengidentifikasi kebutuhan terhadap catatan dan dokumen pendukung laporan keuangan; dan (5) menyusun argumentasi yang

relevan dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik untuk kepentingan pengawasan.

Masalah yang ingin dipecahkan

Berdasarkan kondisi awal dan hasil identifikasi kebutuhan, masalah utama yang ingin dipecahkan melalui kegiatan ini adalah keterbatasan kemampuan mahasiswa dalam menerjemahkan informasi keuangan pemerintah daerah yang bersifat teknis menjadi informasi yang dapat dipahami dan digunakan untuk pengawasan publik. Permasalahan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa aspek.

Pertama, mahasiswa belum sepenuhnya memahami bahwa transparansi tidak hanya berarti tersedianya atau dipublikasikannya dokumen, tetapi juga mencakup kemudahan informasi untuk ditemukan, dipahami, dibandingkan, dan digunakan. Kedua, mahasiswa mengalami kesulitan memahami tujuan eliminasi transaksi internal dan membedakan transaksi antarunit pemerintah dengan transaksi yang melibatkan pihak eksternal. Ketiga, mahasiswa belum mampu menjelaskan secara konsisten perbedaan antara informasi berbasis anggaran dan informasi berbasis akrual serta implikasinya terhadap interpretasi laporan keuangan. Keempat, mahasiswa masih memerlukan penguatan dalam menelusuri angka dalam laporan keuangan melalui catatan atas laporan keuangan dan dokumen pendukung. Kelima, mahasiswa belum terbiasa menghubungkan informasi keuangan dengan hak atas informasi publik serta menyusun pertanyaan atau argumentasi yang dapat digunakan dalam proses pengawasan.

Dengan demikian, kegiatan ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan antara pemahaman teknis akuntansi pemerintahan dan kemampuan menggunakan informasi keuangan untuk kepentingan publik. Penyelesaian masalah dilakukan melalui edukasi berbasis contoh, diskusi kasus, latihan analisis, dan simulasi sidang komisi informasi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi juga memiliki pengalaman menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks keterbukaan dan pengawasan informasi keuangan pemerintah daerah.

MATERI DAN METODE

Materi

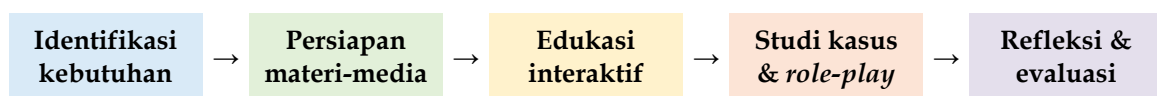
Materi kegiatan disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan peserta dan diarahkan pada penguatan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Materi meliputi: (1) konsep transparansi dan akuntabilitas informasi publik; (2) hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik; (3) karakteristik informasi keuangan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pengawasan; (4) konsep konsolidasi dan eliminasi transaksi internal antarsatuan kerja; (5) perbedaan informasi berbasis anggaran dan berbasis akrual; (6) pemanfaatan catatan atas laporan keuangan sebagai informasi pendukung; serta (7) penyusunan argumentasi dan pertanyaan dalam memperoleh informasi publik.

Materi disajikan dengan mengacu pada regulasi keterbukaan informasi publik dan konsep dasar akuntansi pemerintahan. Penyampaian materi tidak diarahkan semata-mata pada penguasaan istilah teknis, tetapi pada kemampuan peserta menghubungkan informasi

keuangan dengan kebutuhan pengawasan publik. Oleh karena itu, materi dilengkapi dengan contoh numerik sederhana, ilustrasi, studi kasus, dan situasi yang memungkinkan peserta mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dalam proses pengawasan.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang mengombinasikan penyampaian materi, diskusi, analisis kasus, dan simulasi. Kegiatan diawali dengan asesmen awal melalui pertanyaan apersepsi dan diskusi pembuka untuk mengidentifikasi pemahaman peserta mengenai transparansi, akuntabilitas, dan informasi keuangan pemerintah daerah. Hasil asesmen awal digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan penyampaian materi dengan kebutuhan peserta.



Gambar 1. Bagan Alur Pelaksanaan Program Edukasi

Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdian, 2026

Tahap berikutnya adalah penyampaian materi menggunakan presentasi visual, bahasa yang sederhana, dan contoh numerik untuk menjelaskan konsep transparansi dan akuntabilitas informasi publik, konsolidasi dan eliminasi transaksi internal, serta perbedaan informasi berbasis anggaran dan berbasis akrual. Setelah penyampaian materi, peserta dilibatkan dalam diskusi dan analisis kasus secara berkelompok. Kasus yang diberikan berkaitan dengan ketersediaan dan keterpakaian informasi, keterlacakan angka dalam laporan keuangan, serta kebutuhan terhadap dokumen pendukung. Hasil analisis kemudian didiskusikan untuk menghubungkan konsep akuntansi pemerintahan dengan praktik pengawasan publik.

Selanjutnya, peserta mengikuti simulasi sidang komisi informasi dengan memainkan peran sebagai pihak yang membutuhkan informasi dan pihak yang memberikan atau mengelola informasi. Simulasi ini bertujuan melatih kemampuan peserta dalam menyusun pertanyaan, alasan, dan argumentasi terkait akses informasi publik. Pada tahap akhir, evaluasi dilakukan menggunakan lima indikator kemampuan yang diamati melalui respons diskusi, hasil analisis kelompok, keputusan dalam simulasi, dan dokumentasi kegiatan. Setiap indikator dikategorikan menjadi tercapai, tercapai sebagian, atau memerlukan penguatan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi capaian kegiatan sekaligus aspek yang masih memerlukan penguatan pada peserta.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 13 Mei sampai dengan 3 Juni 2026 di Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Peserta kegiatan merupakan mahasiswa dalam satu kelas pada Semester Genap 124 Tahun Akademik 2025/2026. Pelaksanaan kegiatan mencakup rangkaian asesmen awal, penyampaian materi, diskusi dan analisis kasus, simulasi sidang komisi informasi, serta evaluasi.

HASIL DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan edukasi transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dilaksanakan melalui tiga bentuk interaksi utama, yaitu pemaparan materi dan tanya jawab, analisis kasus secara berkelompok, serta simulasi (*role-play*) sidang komisi informasi. Pada tahap awal, peserta diberikan pertanyaan apersepsi untuk mengetahui pemahaman mengenai transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Respons awal menunjukkan bahwa transparansi masih cenderung dipahami sebagai ketersediaan atau publikasi dokumen. Melalui pertanyaan lanjutan mengenai lokasi dokumen, kemudahan mengunduh, kejelasan akun, tingkat rincian, dan hubungan laporan dengan dokumen pendukung, peserta mulai diarahkan untuk memahami transparansi secara lebih substantif.

Pada pembahasan materi konsolidasi dan eliminasi transaksi internal, peserta diberikan contoh sederhana mengenai transfer antarunit pemerintah. Contoh tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa penjumlahan laporan tanpa eliminasi dapat menyebabkan perhitungan ganda dan memperbesar angka pendapatan atau belanja agregat. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta mampu menjelaskan risiko tersebut dengan mengidentifikasi apakah transaksi yang terjadi benar-benar menunjukkan adanya sumber daya baru dari pihak eksternal. Peserta juga mulai menghubungkan perhitungan ganda dengan potensi kesalahan dalam membandingkan laporan antarperiode dan menilai skala aktivitas pemerintah.

Materi berikutnya membahas perbedaan informasi berbasis kas dan akrual melalui contoh numerik sederhana. Peserta diberikan ilustrasi pengeluaran kas sebesar Rp80 juta dan tambahan kewajiban sebesar Rp20 juta untuk menjelaskan perbedaan antara kas yang telah dibayarkan dan beban yang telah timbul. Melalui diskusi, peserta dapat menjelaskan bahwa kewajiban merupakan tanggungan yang telah muncul meskipun pembayarannya belum dilakukan, sedangkan penyusutan menggambarkan berkurangnya manfaat aset yang digunakan dalam pelayanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan contoh numerik dan bahasa nonteknis membantu peserta memahami konsep akrual yang sebelumnya relatif abstrak.



Gambar 2.

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian,
2026

Tahap selanjutnya dilakukan melalui simulasi (*role-play*) sidang komisi informasi yang mempertemukan aspek teknis keuangan dengan hak atas informasi publik. Peserta dibagi ke dalam beberapa peran, yaitu pemohon informasi, badan publik, analis, dan komisioner. Kelompok pemohon menyusun objek permintaan informasi secara lebih spesifik, sedangkan

kelompok badan publik menjelaskan informasi yang tersedia dan kemungkinan pembatasannya. Kelompok analis menilai hubungan antara dokumen dengan angka dalam laporan keuangan, sementara kelompok komisioner menentukan keputusan berupa menerima, menerima sebagian, atau menolak permintaan disertai alasan. Melalui simulasi tersebut, peserta mulai memahami bahwa informasi yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik pada prinsipnya dapat diakses, tetapi bagian tertentu dapat dibatasi atau disamarkan apabila termasuk informasi yang dilindungi.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan lima indikator kemampuan yang disusun berdasarkan tujuan program dan permasalahan sasaran. Penilaian didasarkan pada bukti yang tersedia dari respons peserta selama diskusi, hasil analisis kasus, parafrasa konsep, keputusan dalam simulasi, dan catatan fasilitator. Setiap indikator dikategorikan menjadi tercapai atau tercapai sebagian berdasarkan terpenuhi atau belum terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Indikator, Bukti Empiris, dan Tingkat Pencapaian Program

Fokus	Indikator dan Kriteria	Bukti Empiris yang Tersedia	Capaian
Transparansi substantif	Peserta mampu menyebutkan sedikitnya tiga unsur kegunaan informasi, yaitu mudah ditemukan, dapat diakses/diunduh, cukup rinci, dan dapat dipahami.	Respons diskusi berkembang dari pemahaman “dokumen diunggah” menuju aspek aksesibilitas, keterbacaan, rincian, dan konteks informasi.	Tercapai
PSAP 11/Konsolidasi	Peserta mampu menjelaskan transfer internal, risiko <i>double counting</i> , dan tujuan eliminasi transaksi internal.	Peserta menjelaskan bahwa transfer antarunit bukan merupakan sumber daya baru dari luar entitas pelaporan dan dapat menggelembungkan angka agregat apabila tidak dieliminasi.	Tercapai
PSAP 12/Akrual	Peserta mampu membedakan kas yang telah dibayarkan dengan beban yang telah timbul serta memberikan contoh kewajiban.	Peserta mampu memparafrasekan contoh Rp80 juta kas dan Rp100 juta beban serta menjelaskan konsep kewajiban dan penyusutan.	Tercapai
Akses informasi publik	Peserta mampu menentukan dokumen yang relevan dan memberikan alasan untuk membuka, membuka sebagian, atau membatasi informasi.	Keputusan dalam <i>role-play</i> memuat objek dokumen, kepentingan publik, serta kemungkinan penyamaran bagian informasi yang dilindungi.	Tercapai
Penelusuran laporan	Peserta mampu menelusuri angka agregat melalui Catatan atas Laporan Keuangan dan memahami istilah standar yang relevan.	Peserta memahami kebutuhan terhadap informasi yang lebih rinci, tetapi istilah entitas pelaporan, transaksi timbal balik, dan eliminasi resiprokal masih memerlukan contoh dan penguatan.	Tercapai sebagian

Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdian, 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, empat dari lima indikator program tercapai, sedangkan satu indikator tercapai sebagian. Dengan demikian, 80% indikator program telah mencapai kriteria yang ditetapkan. Persentase tersebut menunjukkan proporsi indikator yang tercapai dan tidak dimaknai sebagai 80% peserta mengalami peningkatan kemampuan. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa peserta mulai mampu mengubah informasi teknis menjadi pertanyaan yang lebih relevan, seperti mempertanyakan asal suatu angka, kewajiban yang belum dibayar, kebutuhan terhadap rincian informasi, serta dasar pembukaan atau pembatasan informasi publik.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif dapat membantu peserta memahami transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah secara lebih kontekstual. Penggunaan bahasa yang lebih sederhana, contoh numerik, dan ilustrasi kasus membantu mengurangi kesulitan dalam memahami konsep akuntansi pemerintahan yang bersifat teknis. Temuan ini sejalan dengan Langella *et al.* (2023) yang menunjukkan pentingnya penyajian informasi keuangan yang lebih mudah dipahami untuk mendukung pemahaman masyarakat. Dalam kegiatan ini, penyederhanaan materi tidak dilakukan dengan menghilangkan konsep teknis, tetapi dengan memberikan ilustrasi dan analogi terlebih dahulu sebelum peserta diarahkan kembali pada istilah dan konsep formal.

Capaian pada indikator transparansi substantif juga menunjukkan bahwa peserta mulai memahami perbedaan antara sekadar menyediakan informasi dan menyediakan informasi yang dapat digunakan. Informasi yang sulit ditemukan, tidak dapat diunduh, terlalu agregat, atau tidak memiliki penjelasan pendukung belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna. Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan jumlah informasi yang tersedia, tetapi juga dengan keterpahaman dan kemampuan pengguna dalam menafsirkan informasi (Heald, 2006; Grimmelikhuijsen & Meijer, 2014).

Simulasi sidang komisi informasi memberikan pengalaman yang menghubungkan aspek teknis akuntansi dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Peserta yang berperan sebagai pemohon harus menyusun permintaan informasi secara spesifik, sedangkan pihak badan publik harus memberikan alasan atas pemberian atau pembatasan informasi. Pola interaksi tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban menyediakan laporan, tetapi juga dengan kemampuan menjelaskan tindakan dan memberikan informasi kepada pihak yang berhak meminta penjelasan (Bovens, 2007). Temuan ini sejalan dengan Harrison dan Sayogo (2014) yang menempatkan keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur yang saling berkaitan dalam praktik pemerintahan terbuka.

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh beberapa faktor, yaitu penggunaan istilah yang konsisten dalam materi, penyederhanaan contoh numerik, penggunaan studi kasus yang relevan, serta pembagian peran dalam simulasi. Metode tersebut mendorong peserta untuk melihat persoalan dari perspektif yang berbeda sehingga diskusi tidak hanya berfokus pada aspek teknis laporan keuangan. Namun, terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan waktu dan kepadatan materi. Materi mengenai PSAP 11, PSAP 12, keterbukaan informasi, dan penyelesaian sengketa informasi membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk dapat dipahami secara mendalam. Kondisi tersebut terutama terlihat pada indikator penelusuran angka melalui Catatan atas Laporan Keuangan yang masih memerlukan contoh berulang.

SIMPULAN

Program edukasi transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah memberikan manfaat dalam memperkuat kemampuan mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi dalam memahami dan menggunakan informasi keuangan publik. Berdasarkan hasil evaluasi kualitatif terstruktur, empat dari lima indikator program tercapai, sedangkan satu indikator, yaitu kemampuan menelusuri angka melalui Catatan atas Laporan Keuangan, tercapai sebagian. Peserta menunjukkan kemampuan dalam membedakan ketersediaan dokumen dengan keterpakaian informasi, menjelaskan risiko perhitungan ganda akibat transaksi internal, membedakan informasi berbasis kas dan akrual, serta menyusun argumentasi mengenai akses informasi publik secara lebih proporsional. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan melalui pemaparan materi, contoh numerik, analisis kasus, dan *role-play* dapat membantu peserta menghubungkan konsep akuntansi pemerintahan dengan kebutuhan pengawasan publik.

Saran Kegiatan Lanjutan

Kegiatan lanjutan disarankan dilaksanakan dalam tiga sesi, yaitu pemahaman hak informasi dan struktur laporan keuangan, latihan membaca laporan pemerintah daerah, serta *role-play* dan presentasi rekomendasi. Prioritas materi adalah penelusuran Catatan atas Laporan Keuangan agar peserta mampu menghubungkan angka agregat, rincian, dan dokumen pendukung secara lebih mandiri.

Ucapan Terimakasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, serta seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya kegiatan ini.

REFERENSI

- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization: Evidence from an online experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(1), 137–157. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus048>
- Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. *Government Information Quarterly*, 31(4), 513–525. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.002>
- Heald, D. (2006). Varieties of transparency. In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The key to better governance?* (pp. 25–43). Oxford University Press. <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263839.003.0002>
- Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Putusan Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024*.

- Langella, C., Anessi-Pessina, E., Botica Redmayne, N., & Sicilia, M. (2023). Financial reporting transparency, citizens' understanding, and public participation: A survey experiment study. *Public Administration*, 101(2), 584–603. <https://doi.org/10.1111/padm.12804>
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (2021).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

Accepted author version posted online: 8/26/2026
Maya Mustika (Reviewing editor)

FUNDING

Tidak ada informasi mengenai sumber pendanaan kegiatan ini

COMPETING INTERESTS

Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.